



**MANAJEMEN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) DI DESA ANJIR PULANG PISAU KECAMATAN
KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

**Theresia Karuniani¹, Sadar², Widya Rahmat³,
Luci Afiani Oktavia⁴**

^{1'2'3'4}Prodi Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Email: karunianitheresia@gmail.com sadarbahtiar@umpr.ac.id



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

Abstrak

Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Anjir Pulang Pisau merupakan usaha yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan desa bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sistem manajemen yang baik akan memudahkan desa dalam mencapai tujuan bersama. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui tentang manajemen pengelolaan BUMDes Hinje Atei di Desa Anjir Pulang Pisau. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data yaitu kepala desa, pengurus BUMDes dan Masyarakat Desa Anjir Pulang Pisau. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa temuan yang melatarbelakangi manajemen pengelolaan BUMDes Hinje Atei di Desa Anjir Pulang Pisau masih belum berjalan dengan baik yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki belum memenuhi kebutuhan masyarakat, pemilihan jenis usaha BUMDes tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Anjir Pulang Pisau dan harga saprodi yang ditawarkan BUMDes lebih mahal dibanding di pertokoan .

Kata Kunci: Manajemen, BUMDes, Desa



Abstract

Management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Anjir Pulang Pisau Village is an effort made to increase village income for the welfare of the community. Having a good management system will make it easier for villages to achieve common goals. The aim of this research is to find out about the management of BUMDes Hinje Atei in Anjir Pulang Pisau Village. This research uses a qualitative approach, descriptive method, and the data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Meanwhile, the data sources are the village head, BUMDes administrators and the Anjir Pulang Pisau Village Community. The results of the research show that there are several findings behind the management of BUMDes Hinje Atei in Anjir Pulang Pisau Village which is still not running well, namely that the Human Resources (HR) owned do not meet the needs of the community, the selection of the type of BUMDes business is not in accordance with the potential of the Village Anjir Pulang Pisau and the prices of inputs



offered by BUMDes are more expensive than in shops.

Keywords: *Management, BUMDes, Village*

Pendahuluan

Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang diperoleh dengan cara demokratis dari pembagian wilayah Republik Indonesia yang kedudukannya sejajar dengan kelurahan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi Desa yang dimaksud yaitu otonomi pemerintah desa dalam menjalankan suatu proses pengelolaan keuangan desa, mengatur serta mengurus pemerintahan sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di suatu desa tersebut. Pemerintah Pusat memberikan Kebijakan Alokasi Dana Desa sebagai bentuk otonomi yang diberikan desa untuk mengolah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kebijakan Alokasi Dana Desa memiliki maksud untuk memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam suatu kebijakan maupun program pemerintah desa yang nantinya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Terdapat berbagai program pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan perekonomian desa agar dapat menghasilkan pendapatan asli desa. Salah satu program pemerintah desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan bentuk wirausaha desa. Berdasarkan penelitian (Ibrahim M. dkk, 2020) meneliti tentang Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, Partisipasi masyarakat berpengaruh dalam manajemen pengelolaan BUMDes, sebab masyarakat sebagai ujung tombak suatu keberhasilan kegiatan serta sebagai tujuan dari kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan BUMDes. Keberhasilan dalam manajemen pengelolaan BUMDes dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes.

Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa PP Nomor 11 Tahun 2021 bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa. Dalam Peraturan ini BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan Penelitian (Kadek D. I dkk., 2018) usaha BUMDes dalam memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat yaitu menyediakan wadah pemberdayaan bagi masyarakat, dimana hal tersebut diharapkan mampu menanggulangi serta mengurangi pengangguran walaupun masih dalam skala kecil. Sasaran pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes yaitu untuk melayani masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif, menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian yang disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Pulang Pisau berpotensi untuk menghasilkan pendapatan asli desa melalui program BUMDes, dimana dari 95 desa terdapat 73 desa yang membentuk BUMDes salah satunya adalah Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir yang bernama BUMDes Hinje Atei. Hinje Atei berasal dari Bahasa Daya yang artinya “ Bersatu Hati “, BUMDes Hinje Atei dibentuk pada tahun 2017 yang bergerak pada bidang



jasa antara lain jasa penyewaan gedung, aula serba guna milik Pemerintah Desa Anjir Pulang Pisau, dan jasa pentas seni tari sanggar Desa Anjir Pulang Pisau “Hinje Atei” hal ini tertuang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hinje Atei tahun anggaran 2017. BUMDes Hinje Atei memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari pengawas, penasehat, ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua unit pertanian dengan jumlah keseluruhan yaitu tujuh orang.

Desa Anjir Pulang Pisau menjalankan program BUMDes di bidang pertanian dan simpan pinjam. BUMDes Hinje Atei bergerak di bidang pertanian berupa penyediaan alat pertanian seperti sewa traktor dan jual beli Sarana Produksi Pertanian (Saprodi). Sedangkan dibidang simpan pinjam BUMDes Hinje Atei menyediakan peminjaman modal awal dengan bunga yang ditentukan bagi masyarakat. Namun bidang usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hinje Atei tahun anggaran 2017. Hal ini menyebabkan kegiatan BUMDes Hinje Atei sempat terhenti sampai dengan sekarang.

Pengelolaan BUMDes terpisah dengan pengelolaan organisasi pemerintahan Desa dimana dalam pelaksanaannya sesuai dengan Permendes PD TT No 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. Dalam melaksanakan dan mengembangkan BUMDes diharapkan dapat menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta menjalankan kerjasama dengan lembaga perekonomian desa lainnya. Berdasarkan penelitian (Sari. K dkk, 2021) menyatakan bahwa pengembangan usaha sesuai potensi desa dapat lebih efektif dibandingkan dengan pemanfaatan usaha yang tidak sesuai dengan potensi. Salah satu contohnya adalah. Desa wisata Pujon Kidul telah baik dalam mengelola potensi desa berupa atraksi alam. Sedangkan berdasarkan penelitian (Zunaidah. A. A dkk, 2021) menjelaskan bahwa melalui pengembangan usaha BUMDes sesuai dengan potensi desa akan memberikan kesejahteraan masyarakat dengan dibuktikan adanya peningkatan PAD dan penurunan jumlah keluarga Pra KS.

Pengelolaan BUMDes dibutuhkan idealisme yang kuat dari para pengurus BUMDes sehingga kegiatan dapat dilakukan secara maksimal serta sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan. Hal tersebut membutuhkan kerjasama antara pemerintah desa, pengurus BUMDes serta masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi desa sebaik mungkin sebagaimana mestinya. Dimana bentuk kerjasama dalam pengelolaan BUMDes dilihat dari penyusunan perencanaan yang sesuai dengan persetujuan bersama. Berdasarkan penelitian (Gunakan. H dkk, 2022) perencanaan kegiatan BUMDes disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat, selain itu dalam kegiatan musyawarah dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Musyawarah dilakukan secara rutin sebagai bentuk pengawasan secara berkala.

Pengelolaan BUMDes Hinje Atei di Desa Pulang Pisau ditemukan beberapa faktor yang menghambat dalam pengelolaan BUMDes yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh BUMDes belum memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana SDM BUMDes Hinje Atei kurang adanya koordinasi antar anggota dan kepada pemerintah desa, selain itu pengurus BUMDes Hinje Atei kurang memahami tugas pokok dan fungsi sehingga berakibat kepada kredit macet, pelaporan keuangan tidak berjalan dan kurang



adanya sosialisasi tentang BUMDes Hinje Atei kepada masyarakat. Penghambat berikutnya adalah pemilihan jenis usaha BUMDes tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Anjir Pulang Pisau, dimana BUMDes Hinje Atei bergerak di bidang pertanian dan simpan pinjam sedangkan potensi dimiliki Desa Anjir Pulang Pisau adalah di bidang perkebunan seperti kelapa sawit dan getah karet. Penghambat yang terakhir adalah, barang saprodi yang ditawarkan BUMDes lebih mahal dibandingkan di perkotaan, masyarakat lebih memilih untuk membeli di toko dibandingkan pada BUMDes itu sendiri.

Penelitian terdahulu tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu menjadi pembanding fokus penelitian yang akan diteliti dan sudah diteliti oleh peneliti lain. Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dan juga melihat hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan, diantaranya sebagai berikut: Sari. K dkk, (2021) Potensi Lokal dan Pengembangan Desa Wisata Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES): (Studi Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang) menyatakan bahwa pengembangan usaha sesuai potensi desa dapat lebih efektif dibandingkan dengan pemanfaatan usaha yang tidak sesuai dengan potensi. Salah satu contohnya adalah. Desa wisata Pujonkidil telah baik dalam mengelola potensi desa berupa atraksi alam . sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zunaidah. A. A dkk (2021) Peran Usaha Bumdes Berbasis Pertanian Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. menjelaskan bahwa melalui pengembangan usaha BUMDes sesuai dengan potensi desa akan memberikan kesejahteraan masyarakat dengan dibuktikan adanya peningkatan PAD dan penurunan jumlah keluarga Pra KS.

Kadek D. I dkk, (2018) meneliti tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, BUMDes menyediakan wadah pemberdayaan bagi masyarakat, dimana hal tersebut diharapkan mampu menanggulangi serta mengurangi pengangguran walaupun masih dalam skala kecil.

Ibrahim M. dkk, (2020) meneliti tentang Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, Partisipasi masyarakat berpengaruh dalam manajemen pengelolaan BUMDes , sebab masyarakat sebagai ujung tombak suatu keberhasilan kegiatan serta sebagai tujuan dari kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan BUMDes.

Gunawan H dkk, (2022) tentang Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah, perencanaan kegiatan BUMDes disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat, selain itu dalam kegiatan musyawarah dapat digunakan untuk memecahkan masalah . Musyawarah dilakukan secara rutin sebagai bentuk pengawasan secara berkala.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat di simpulkan bahwa pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, dimana BUMDes tersebut berjalan sesuai potensi, masyarakat yang mau ikut berpartisipasi, melaksanakan sistem musyarawah dengan benar, berhasil meningkatkan PADes, mensejahterakan masyarakat dengan mengurangi angka pengangguran dan SDM yang sesuai dengan yang di butuhkan.



Sedangkan penelitian yang penulis lakukan di Desa Anjir Pulang Pisau dengan fokus pada manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, yaitu BUMDes Hinje Atei dalam sistem manajemen pengelolaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki belum memenuhi kebutuhan masyarakat, pemilihan jenis usaha BUMDes tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Anjir Pulang Pisau dan harga saprodi yang ditawarkan BUMDes lebih mahal dibanding di pertokoan.

Manajemen pengelolaan BUMDes yang baik akan meningkatkan potensi perekonomian masyarakat, jika manajemen pengelolaan BUMDes tidak berjalan baik maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. BUMDes Hinje Atei Desa Anjir Pulang Pisau merupakan salah satu BUMDes yang memiliki sistem manajemen pengelolaan yang belum optimal, hal ini disebabkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki belum memenuhi kebutuhan masyarakat, pemilihan jenis usaha BUMDes tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa Anjir Pulang Pisau serta Harga barang yang ditawarkan BUMDes Hinje Atei lebih mahal dibandingkan harga barang pada pertokoan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pokok pembahasan dalam artikel ini adalah bagaimana manajemen pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Anjir Pulang Pisau ?. Sedangkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang manajemen pengelolaan BUMDes Hinje Atei di Desa Anjir Pulang Pisau.

Metode

Penelitian menggunakan jenis pendekatan kualitatif metode deskriptif, (Sugiono, 2010) pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian tersebut. Teknik Pengumpulan Data (Sugiyono, 2016) terdapat tiga tahapan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa dikemukakan oleh Sugiyono (2012) dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tahapan atau menggunakan langkah-langkah menyatakan proses analisis data dengan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi .

Hasil dan Pembahasan

BUMDes Hinje Atei di Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau adalah BUMDes yang memiliki sistem manajemen pengelolaan yang belum optimal, untuk mengetahui manajemen pengelolaan yang optimal dan belum optimal dilihat dari beberapa faktor yaitu dari segi perencanaan, organisasi, pelaksanaan serta pengawasan.

Perencanaan (*Planning*)

Menurut George R. Terry “Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta - fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan - perkiraan atau asumsi – asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”. (Sukarna, 2011). Perencanaan merupakan hal penting dalam proses penyusunan suatu kegiatan pada periode tertentu, menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hinje Atei tahun anggaran 2017 , BUMDes bergerak dibidang



jasa antara lain jasa penyewaan gedung, aula serba guna milik Pemerintah Desa Anjir Pulang Pisau , dan jasa pentas seni tari sanggar Desa Anjir Pulang Pisau “Hinje Atei” . Di Bidang perdagangan yaitu usaha pembuatan kue, snack dan meubelair yaitu mebel atau furniture diantaranya adalah meja, kursi ataupun lemari. BUMDes Hinje Atei juga bergerak di bidang pertanian, peternakan ayam ras, serta pembelian saprodi . Namun dalam kegiatan BUMDes Hinje Atei tidak sesuai dengan perencanaan awal, dimana terdapat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh ketua BUMDes tanpa adanya koordinasi dengan pengawas BUMDes yaitu kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh ketua BUMDes Hinje Atei yaitu merubah bidang usaha menjadi kursus komputer dan simpan pinjam, hal ini dilakukan oleh dasar keinginan dari ketua BUMDes bukan dari kesepakatan bersama. Dengan adanya perubahan bidang usaha berdampak pada ketidak jelasan bidang usaha yang dilakukan, karena masyarakat cenderung tidak mengetahui hal tersebut. Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) BUMDes Hinje Atei , dalam pemilihan SDM tidak memiliki dasar yang pasti dimana kebanyakan dari pengurusnya dengan mudah untuk menjadi bagian organisasi

BUMDes tanpa melewati seleksi, dimana proses pemilihan kepengurusan BUMDes berdasarkan pada faktor kedekatan antara Kepala Desa terdahulu dengan Ketua BUMDes yang terpilih. Hal ini berdampak pada kinerja SDM , dimana dalam aktivitas BUMDes Hinje Atei ditemukan beberapa masalah yaitu pengurus tidak memahami tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan, pengurus tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya dimana pelaporan keuangan telah berhenti sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang walaupun telah terjadi pergantian kepala desa. Disisi lain, kebanyakan masyarakat Desa Anjir Pulang Pisau tidak mengetahui adanya BUMDes Hinje Atei hal ini menjadi faktor penghambat dalam pergerakan BUMDes Hinje Atei.

Organisasi (*Organizing*)

Menurut George R. Terry “Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang - orang (pegawai), terhadap kegiatan - kegiatan ini, penyediaan faktor - faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.” (Sukarna, 2011). Pengorganisasian BUMDes Hinje Atei dipimpin oleh seorang ketua BUMDes, dimana pemimpin BUMDes diperlukan dalam menempatkan para anggota sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Namun Sumber Daya Manusia (SDM) BUMDes Hinje Atei belum mampu melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai pengurus BUMDes, hal ini disebabkan oleh BUMDes Hinje Atei tidak memiliki dasar yang pasti dalam perekrutan anggota BUMDes Hinje Atei dan menempatkan SDM tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

Ketua BUMDes Hinje Atei seharusnya memberikan pengarahan serta pengawasan yang dilakukan guna menyelaraskan pemahaman kinerja baik dengan anggota, masyarakat, serta kepala desa sebagai salah satu pengawas BUMDes. Namun fakta yang ditemukan bahwa selama ini Ketua BUMDes Hinje Atei melaksanakan tugas berdasarkan kemauan sendiri, hal ini dibuktikan dengan adanya penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan



kerja tanpa adanya koordinasi dengan pengawas BUMDes, masyarakat bahkan dengan anggotanya sendiri. Selama berdirinya BUMDes Hinje Atei terdapat beberapa kali perubahan bidang kerja dipengaruhi oleh keputusan ketua BUMDes tanpa melibatkan pihak-pihak lain, hal ini berdampak pada hubungan antara masyarakat dan pengawas dengan BUMDes Hinje Atei yang kurang baik. Tujuan berdirinya BUMDes yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan kesejahteraan perorangan.

Pelaksanaan (*Acuating*)

Menurut George R. Terry “Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha- usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”. (Sukarna, 2011). Dalam Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes yang terbentuk sejak tahun 2017 di Desa Anjir Pulang Pisau ditemukan banyak permasalahan seperti kegiatan BUMDes tidak berjalan sesuai dengan perencanaan awal yaitu bergerak di bidang jasa, bidang pertanian , peternakan ayam ras, serta pembelian saprodi namun telah beberapa kali terjadi perubahan tanpa adanya koordinasi dengan pihak pengawas maupun masyarakat tetapi dilakukan dengan dasar arahan pemimpin BUMDes Hinje Atei itu sendiri.

Pengurus BUMDes Hinje Atei tidak mampu untuk memulihkan modal yang telah diberikan kepada masyarakat, dimana telah terjadi kemacetan dana. Hal ini disebabkan oleh pengurus BUMDes tidak memiliki dasar dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat sehingga pengurus kesulitan saat proses penagihan. Sebab dasar yang digunakan dalam kegiatan peminjaman adalah faktor kedekatan bukan melalui standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Faktor kedekatan yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan pengurus BUMDes. Selain itu kemacetan dana disebabkan oleh masyarakat yang tidak konsisten untuk membayar produk saprodi yang telah dipinjamkan karena masyarakat merasa modal tersebut milik pemerintah desa, jadi masyarakat menganggap modal yang dipinjamkan adalah bantuan bukan modal pinjaman.

Bidang yang dipilih oleh BUMDes Hinje Atei tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Anjir Pulang Pisau, hal ini berdampak pada mandeknya BUMDes Hinje Atei. Masyarakat merasa tidak terbantu dengan keberadaan BUMDes Hinje Atei, selain itu BUMDes Hinje Atei kalah saing dengan bantuan dari pemerintah yang menawarkan jasa tanpa pungutan biaya , selain itu BUMDes Hinje Atei memberikan harga yang lebih tinggi untuk saprodi dibandingkan harga di pertokoan. Dari beberapa faktor tersebut menjadi hambatan dalam manajemen pengelolaan BUMDes Hinje Atei di Desa Anjir Pulang Pisau.

Pengawasan (*controlling*)

Menurut George R. Terry “Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan - perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)”. (Sukarna, 2011). Tujuan pengawasan adalah agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan rencana yang telah dibuat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hinje Atei di Desa Anjir Pulang Pisau telah berdiri sejak tahun 2017 namun dalam pelaksanaannya



beberapa kali berhenti salah satu faktornya yaitu terjadinya Covid-19. Kepala Desa Anjir Pulang Pisau sebagai pengawas kegiatan BUMDes Hinje Atei telah melaksanakan pengawasan yaitu melakukan pendekatan kepada BUMDes Hinje Atei untuk memecahkan permasalahan yang menghambat pergerakan BUMDes Hinje Atei, namun dari pihak BUMDes Hinje Atei tidak menanggapi usaha yang dilakukan oleh pengawas yaitu kepala desa.

Dampak dari kurang adanya koordinasi antara organisasi BUMDes dengan pengawas dan pemerintah desa serta masyarakat yaitu BUMDes berjalan sesuai dengan kemauan dari ketua BUMDes itu sendiri dimana hal tersebut tidak sesuai dengan rencana awal pendirian BUMDes Hinje Atei. Jika hal ini terus terjadi maka pengawas akan bertindak tegas yaitu dengan mengadakan rapat untuk memecahkan masalah ini dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan di Desa Anjir Pulang Pisau beserta masyarakat Desa Pulang Pisau. Berdasarkan hasil analisis terhadap Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ditemukan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam Manajemen Pengelolaan BUMDes yaitu sebagai berikut:

Faktor Pendukung

BUMDes Hinje Atei dilihat dari Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa, pendamping desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah rutin melakukan pengawasan serta pendekatan dengan kepengurusan BUMDes Hinje Atei, walaupun usaha tersebut tidak mendapatkan feedback dari ketua BUMDes Hinje Atei. Sangat disayangkan jika pendanaan BUMDes yang telah diberikan bagi setiap desa hanya untuk kepentingan perorangan bukan menjadi strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program BUMDes. Dan Potensi yang dimiliki oleh Desa Anjir Pulang Pisau pada bidang peternakan, tanaman pangan, perkebunan serta tanaman hortikultura yang dapat dikelola menjadi bidang usaha BUMDes untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dari manajemen pengelolaan sumber daya yang bersumber modal melalui BUMDes.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat Manajemen Pengelolaan BUMDes Hinje Atei terbagi menjadi tiga yaitu, Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) disusun sesuai dengan kehendak ketua BUMDes Hinje Atei, dimana hal tersebut tidak melalui dasar yang pasti. Dampak dari penyusunan struktur keanggotaan tersebut mendorong terjadinya penyimpangan kinerja baik dari keanggotaan BUMDes maupun ketua BUMDes itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kurang adanya usaha pengurus BUMDes untuk meningkatkan pengembalian pinjaman modal dari masyarakat, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya penyertaan modal yang macet, masyarakat Desa Anjir Pulang Pisau kurang mengetahui keberadaan serta fungsi BUMDes tersebut yang dipengaruhi oleh kurang adanya sosialisasi.

Faktor penghambat yang kedua adalah bidang yang dipilih oleh BUMDes Hinje Atei kurang tepat untuk Desa Anjir Pulang Pisau, sebab mayoritas masyarakat adalah berkebun kelapa sawit dan getah karet, pegawai negeri sipil dan sebagian kecil masyarakat yang menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian. Dampak dari hal tersebut menciptakan persaingan dengan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari



pemerintah, dimana memiliki kesamaan pada penyediaan sarana prasarana pertanian seperti traktor.

Faktor penghambat yang terakhir adalah harga barang pada BUMDes Hinje Atei lebih mahal dibandingkan dengan harga barang pada pertokoan di daerah Desa Anjir Pulang Pisau . Oleh sebab itu masyarakat lebih memilih membeli kebutuhan saprodi di pertokoan dengan harga yang terjangkau.

Upaya pemerintah desa dalam menangani polemik yang terjadi terkait Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 yaitu sebagai berikut : Upaya pemerintah desa yang pertama adalah melakukan pendekatan berupa mengajak kepengurusan BUMDes Hinje Atei saat ini untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang telah terjadi, agar dapat dipertanggungjawabkan terlebih dahulu sehingga nantinya dapat memulai usaha baru sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa Anjir Pulang Pisau. Pendanaan yang diperuntukkan bagi modal BUMDes saat ini masih belum dilakukan pencairan , hal ini disebabkan oleh masih banyaknya polemik di dalam BUMDes. Usaha selanjutnya yaitu akan dilakukan pemilihan ulang untuk kepengurusan BUMDes yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat melakukan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Sebab BUMDes Hinje Atei membutuhkan perombakan dari awal, baik dari perencanaan, pengorganisasian sampai pada pelaksanaan.

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil observasi yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari masih adanya hambatan-hambatan dalam melakukan pengelolaan BUMDes Hinje Atei yaitu Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) disusun berdasarkan keputusan ketua BUMDes bukan dari keputusan bersama, selain itu SDM yang telah menjadi pengurus kurang memahami tugas pokok dan fungsi sebagai pengurus BUMDes . Oleh sebab itu berdampak pada terjadinya penyertaan modal awal yang masih ada pada masyarakat dan belum ada pengembalian. Faktor penghambat lainnya adalah bidang usaha yang dipilih tidak sesuai dengan potensi desa dan harga barang Saprodi yang ditawarkan BUMDes lebih mahal dibandingkan dengan harga di pertokoan. Di sisi lain masyarakat Desa Anjir Pulang Pisau kurang mengetahui keberadaan serta fungsi BUMDes yang dipengaruhi oleh kurang adanya sosialisasi dari pihak pengurus BUMDes Hinje Atei Desa Anjir Pulang Pisau .

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan sarana dalam Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dengan melakukan perubahan baik dari segi pengorganisasian maupun perencanaan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan wajah baru bagi BUMDes Hinje Atei, diharapkan dengan adanya perubahan keanggotaan dapat berpengaruh kepada kinerja pengurus yang telah diseleksi sesuai



dengan kebutuhan serta mampu mengerjakan tugas pokok dan fungsi sebagai pengurus BUMDes Hinje Atei. Selain itu, dibutuhkan perbaikan dalam hal perencanaan, dimana bidang yang akan dipilih sebagai bentuk usaha BUMDes harus disesuaikan dengan potensi serta melalui kesepakatan bersama, dan yang terakhir adalah memberikan pelatihan bagi SDM yang akan menjadi pengurus BUMDes untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan.

Daftar Pustaka

- Agunggunanto, dkk. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Alviant, A. (2022). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Asvi, Z. (2017). Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. *Jom Fisip*, 4(2), 1-15.
- Azis Nasar, A. (2021). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Rompegading Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).
- Darwita, dkk (2018). Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 9(1), 51-60.
- Fatimah, S. (2022). Analisis Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Jaya Di Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak (Doctoral dissertation).
- Febryany, dkk . (2023). Manajemen Badan Usaha Milik Desa Mitra Maju Sejahtera Desa Gunung Putri Kabupaten Bogor. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 581-592.
- Gunawan, dkk (2022). Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojong Gede Bogor.
- Ibrahim, dkk (2020). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Movere Journal*, 2(2), 56-62.
- Nugroho . R dan Suprpto. F (2021). Buku Badan Usaha Milik Desa Bagian 2 : Pendirian BUMDes.
- Nugroho . R dan Suprpto. F (2021). Buku Badan Usaha Milik Desa Bagian 3 : Operasional dan Bentuk BUMDes.
- Prasetyo. D (2019). Buku Peran BUMDes dalam Membangun Desa.
- Sari, dkk (2021, June). Potensi Lokal dan Pengembangan Desa Wisata Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES): Studi Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan (Vol. 1, No. 2, pp. 109-114)*.



Zunaidah, dkk (2021). Peran usaha bumdes berbasis pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis*, 21(1), 47-57.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang BUMDes.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Noor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Pulang Pisau.